

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 3 Bulan Desember 2021 (tanggal 10 s.d 16 Desember)

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCIEVER STATION (BTS)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Ahmad Budiman
Peneliti Madya/Politik Dalam Negeri
ahmad.budiman@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Target pembangunan BTS di 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh pemerintah daerah hingga kepala desa. Pada tahun 2021 diselesaikan 4.200 target dan di tahun 2022 diselesaikan 3.704 target. Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Posisi menara BTS berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung.

Pemerintah membuat kebijakan dalam rangka menjawab tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi khususnya BTS 4G yaitu lokasinya terpencil dan tidak ada akses infrastruktur dasar seperti jalannya dan listriknya belum ada. Upaya mengatasi tantangan ini akan berhasil terjawab kalau ini difasilitasi oleh Pemda sebagai pemilik lokasi. Penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah (Pemda) menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.

Skema pinjam pakai lahan bersama-sama akan mendatangkan manfaat terutama bagi desa atau wilayah kabupaten tersebut. Diharapkan dari 9.113 *blankspot* di daerah 3T termasuk 3.345 yang non 3T, ditargetkan selesai diatasi semuanya di akhir tahun 2022. Skema pinjam pakai lahan ini telah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya. Melalui kebijakan seperti ini, Pemerintah menilai akan memudahkan solusi atas masalah faktor pembiayaan dan lahan. Pemerintah juga memastikan tarif internet akan lebih terjangkau.

SUMBER

Beritasatu.com, 13 Desember 2021.